



# Penganggaran Berbasis Kinerja?

Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) adalah suatu pendekatan dalam sistem perencanaan penganggaran belanja negara yang menunjukkan secara jelas keterkaitan antara alokasi pendanaan kinerja yang diharapkan atas alokasi belanja tersebut serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja.



Sedangkan prinsip-prinsip yang digunakan dalam Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) meliputi:

- 1 Alokasi anggaran disusun dalam dokumen rencana kerja dan anggaran dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dengan menggunakan sumber daya yang efisien
- 2 Money follow function, merupakan prinsip yang menggambarkan bahwa pengalokasian anggaran untuk mendanai suatu kegiatan didasarkan pada tugas dan fungsi unit kerja sesuai maksud pendiriannya
- 3 Fleksibilitas pengelolaan anggaran untuk mencapai hasil dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (et the manager manages).





# FAKTA FAKTA TENTANG KEJAKSAAN RI

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum secara umum memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang mana Tugas dan Fungsinya melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Sejarah Kejaksaan, Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sanskerta. Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa



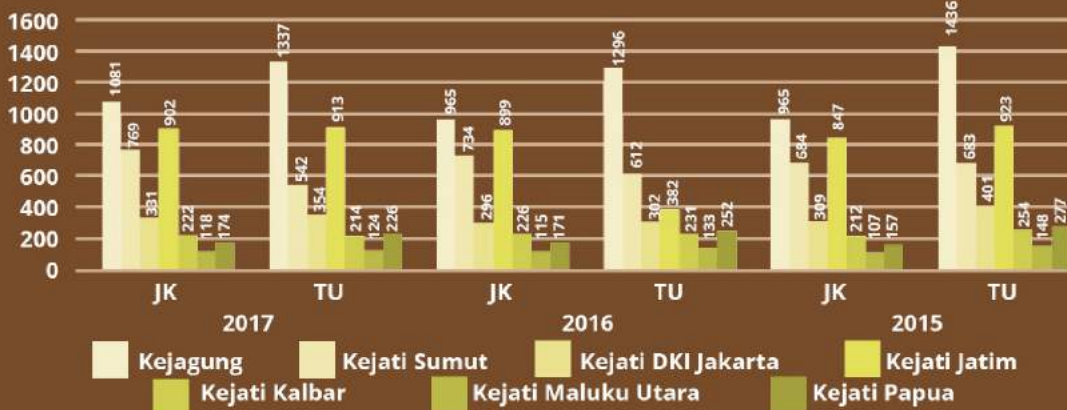
**Peta Jumlah SDM Jaksa dan TU**  
Berdasarkan Provinsi Tahun 2017



Sumber:  
Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2017

**Jumlah Pegawai Kejaksaan**  
Berdasarkan Wilayah Penelitian FITRA

Sumber:  
Data diolah FITRA 2019



Jumlah Kejati, Kejari, dan Cabjari di Indonesia sebanyak 537 sakter. tersebar di 31 Provinsi.

Setiap tahun, capaian kinerja Kejaksaan dalam menangani perkara selalu di atas 120.000 perkara dari target kinerja penanganan perkara rata ratanya 60.000 perkara.

## 14 Unit Kerja yang ada di Kejaksaan Republik Indonesia



Jaksa Agung RI  
Wakil Jaksa Agung



JAM Pembinaan  
JAM Intelijen  
JAM Tindak Pidana Umum  
JAM Tindak Pidana Khusus  
JAM Perdata & TUN  
JAM Pengawasan



BADIKLAT  
Pusat Litbang  
Pusat Penerangan Hukum  
Pusat Daskrimiti  
Pusat Pemulihan Aset  
Kejaksaan Tinggi



# Peningkatan Kualitas Penanganan Perkara Melalui Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) di Kejaksaan RI



## KEKUATAN

Kerjasama FITRA dan IJRS merupakan kolaborasi yang bagus karena menggabungkan pengalaman organisasi di bidang anggaran dan organisasi yang fokus pada isu peradilan.

Kepercayaan Kejaksaan terhadap penelitian ini cukup tinggi sehingga membantu dalam kesuksesan penelitian ini, selain itu kesediaan Kejaksaan Agung mendampingi penelitian ini memberikan dampak yang bagus pada akses data.

Kepercayaan K/L seperti Bappenas, KPK, Kemenkeu, dan BPK terhadap FITRA dan IJRS, menjadi nilai lebih dalam melakukan akses data.

FITRA memiliki Simpul Jaringan di 4 daerah dari 6 daerah penelitian sehingga mempermudah kerja pada saat pengambilan data dan penelitian di daerah.



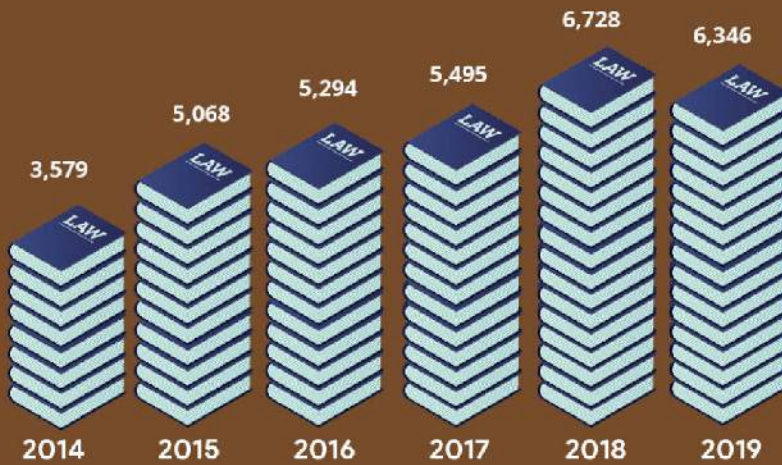
## HASIL

Dari tiga output yang diharapkan, FITRA bersama IJRS telah menyelesaikan satu output berupa Laporan Penelitian Implementasi Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK). FITRA bersama IJRS sedang membuat indikator PBK dan juga menyiapkan peningkatan kapasitas SDM di Kejaksaan yang akan dilaksanakan pada bulan November 2019.

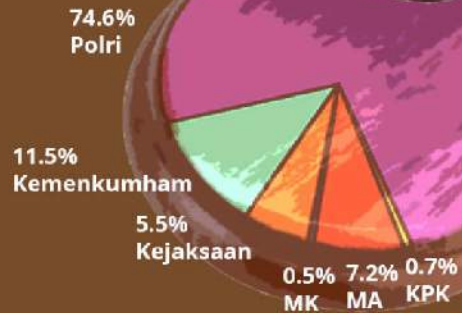


# ANGGARAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

## Anggaran Kejaksaan RI Tahun 2014 - 2019 (dalam miliar Rp.)



Sumber: data olah FITRA



Sumber: Nota APBN diolah FITRA

## Persentasi Realisasi Anggaran Kejaksaan RI Tahun 2014 - 2018



Sumber: data olah FITRA

## Capaian Kinerja Kejaksaan pada Tahun 2016



Penyelamatan Keuangan Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi 331 miliar dan USD 263.929



Penyelamatan dan Pemulihan Keuangan Negara Perdata dan Tata Usaha 21,143 miliar dan 7902 meter tanah



Uang Pengganti yang disetor Ke Kas Negara 197 miliar

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Kejaksaan diolah Seknas FITRA